

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

Ananta Refka Nanda, Ratna Herawati. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 325-336.

Chawa, M. Putra, D. Purba. (2021). Community-based Approach to Empower People with Disabilities. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol.8, 467-480.

C. Ansel, A.Gash. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.

DeSeve. 2007. Creating Managed Networks as a Response to Societal Challenges. *Providing Cutting-Edge Knowledge to Government Leaders The Business Of Government*. Washington.

Dwi Arianto, Nurliana Cipta Apsari. (2022). GAMBARAN AKSESIBILITAS, INKLUSIVITAS, DAN HAMBATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMANFAATKAN LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK: STUDI LITERATUR DI BERBAGAI NEGARA. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 5 No. 2, 156 – 170.

ILO Organization. (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.1, 1-4.

Dini Widinarsih. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 127-142.

Irawan, Denny. (2017). *Collaborative Governance* (Studi Deskriptif Proses

Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, ISSN 1303- 341X VoL.5, No.3.

- K. Marsitadewi. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol.8, 239-252.
- M. Solikin. (2019). Collaborative Governance Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Publika*, Vol.1, 7.
- M. Widowati, I. Agustina. (2021). The Role of the Government in Empowering Persons with Social Welfare with Physical Disabilities. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol.16,1-4.
- Nopriono, Suswanta. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Vol.1,7-8.
- Nursiah. (2013). Peranan Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Perda Kota Makassar No.6 Tahun 2013. *Jurnal Tomalebbi*, Vol.53, 1689-1699.
- N. Nasrulhaq. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.6, 395-402.
- Rachim, Sunu Retno, Hardi Astuti, and Warsono Abd. 2020. *Collaborative Governance Perspektif Dalam Administrasi Publik*. Semarang.
- R. Fitrah, B. Setiawati, A. Parawangi et al. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Bagi Keluarga Pemulung di Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Jurnal unismuh*, Vol.3.
- R. Wirawan, I. Afni, L. Winarni. (2022). Collaborative Governance dalam

Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol.19 , 137-143.

S. Anthony,I. Mujtahid, A. Marta et al. (2023). Disability Empowerment in the Perspective of Collaborative Governance in Kampar District. *International Journal of Social Service and Research*, Vol.3, 990-997.

S. Greenwood, L. Singer, W.Wills. (2021). Collaborative Governance: Principles, Processes, and Practical Tools.

Sudarmo. 2009. Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-hambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. *Jurnal Spirit Publik*. Volume 5; 2.

#### **Buku dan Skripsi:**

Alfiandri, Dhani Akbar. (2019). Collaborative Governance Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi. *Cetakan ke-1. Tanjung Pinang. UMRAH Press.*

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Atrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009)

Endit Arnianti. (2022). Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas di Kota Makassar. *Skripsi, Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar.*

J Ronald Berger, *Introducing Disability Studies* (USA : Lynne Rienner Publishers, 2013)

H.R. Sismono. (2021). Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas. *Cetakan ke-1. Bandung. Nuansa Cendikia.*

- H. Syamsuddin, Zulfitrah, Faizal. (2022). Analisis Kebijakan Kesempatan Pekerja Disabilitas di Kota Makassar. *SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2022*
- Kurniadi. (2020). Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur. *Cetakan ke-1. Yogyakarta. CV Budi Utama.*
- Lumbantobing, Anak Dengan Mental Terbelakang (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 1997)
- Mangunsong, Frieda, dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa, (Jakarta: UI, 1998)
- Mutmainnah. (2016). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Skripsi, Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar, 11-40.*
- N. Fajri, M. Ramadhan, H. Palani et al. (2021). Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis. *Staf ahli bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan kementerian perencanaan pembangunan nasional.*
- Poerwoko dkk., Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung : Alfabeta, 2012)
- Putri Fatimah. (2019). Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo. *Skripsi, Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar.*
- Retno Sunu Astuti dkk. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. *Cetakan ke-1. Semarang. Universitas Diponegoro Press.*
- Rokna Murni, Pemberdayaan Perempuan Pasca Reformasi dalam Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah

Kajian), Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga (tkp: 2010)

Satrina. (2021). Pemberdayaan Disabilitas Fisik pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Kota Makassar. *Skripsi, Uin Alauddin Makassar*.

Syaiful Islamy. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. *Cetakan ke-1. Yogyakarta. CV Budi Utama*.

Yogi Suprayogi Sugandi, Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Wahyuni, Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Sosiologi Terhadap Dampak Pembangunan (Makassar: Alauddin University Press, 2012)

#### **Artikel dan Website:**

Anonim. LITERATURE REVIEW Collaborative Governance.

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/31880/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Bappelitbangda). (2023). Workshop Penyusunan Matriks RAD Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 – 2026. <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/>

Badan Pusat Statistik/ [bps.go.id](https://bps.go.id)

Claire Rapp. (2020). Hypothesis and Theory: Collaborative Governance, Natural Resource Management, and the Trust Environment.

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.00028/full>

KabarMakassar.com. (2022). Menuntut Keadilan, Cerita Difabel di Makassar.

Makassarmetro.com. (2022). Kota Inklusi, Makassar Nyaman Bagi Penyandang Disabilitas.

M. Millott, Fadhilah Trya W. (2021). Disabilitas dan Pembangunan Ikhtisar. *Laporan kemitraan riset Australian-Indonesia*.  
<https://pair.australiaindonesiacentre.org>

Nur Syarif Ramadhan. (2020). Menguji Keberpihakan Anggaran Kota Makassar Terhadap Isu Disabilitas. *Tata Kelola Pemerintahan Edisi 175*.  
<https://baktinews.bakti.or.id>

Unicef.org. (2023). Discussion paper: Key issues for children with disabilities in Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/social-policy/publication/key-issues-children-with-disabilities>

[worldbank.org/en/topic/disability](https://worldbank.org/en/topic/disability)

World Health Organization (WHO). (2019). Disability: fact sheet on Sustainable Development Goals (SDGs): health targets.

<https://difabel.tempo.co/read/1384558/disabilitas-informasi-dan-lingkup-yang-kian-sempit-kala-pandemi-covid>

<https://lontar.id/kebijakan-inklusi-disabilitas-setengah-hati%EF%BB%BF-di-makassar/>

<https://www.klobility.id/post/mengenal-ragam-disabilitas-menurut-undang-undang-no-8-tahun-2016>

### **Dokumen dan Undang- Undang:**

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



Wawancara dengan Ibu Hasna  
Dinsos Makassar  
Kepala sekda penyandang  
disabilitas/pekerja sosial muda



Wawancara dengan Ibu Suhartini  
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Dinsos Makassar

## DOKUMENTASI

## WAWANCARA



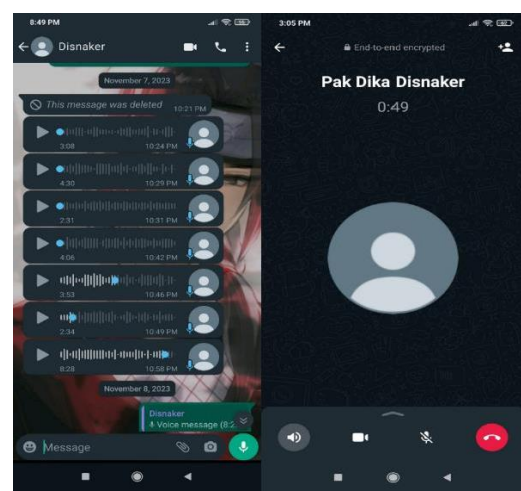
Wawancara dengan Idamayanti  
(Pendamping Disabilitas Dinsos  
Makassar)



Wawancara dengan Bapak Subu, B.  
S.Pd Kepala Sekolah SLB Yapti



Wawancara dengan Nursyarif Ramadhan (Ketua PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan)), Ridwan M (Kepala Penerbitan Pustaka), Muthara Yulina (Bendahara)



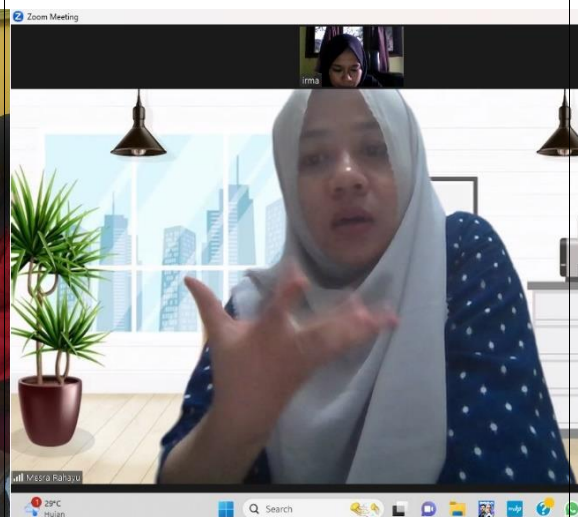
Wawancara dengan Bapak Rizka Mahardika, S.Sos via telepon/WA selaku Fungsional Pengantar Kerja / Bagian dari Unit Layanan Disabilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar

## DOKUMENTASI

## WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Ismail Naharuddin Sekretaris PERTUNI Sulsel



Wawancara dengan Ibu Mesra Rahayu (Funder Global Inklusi dan Dosen Universitas Mega Rezky)





Wawancara dengan Pak Anjas  
Penyuluh Sosial Keuangan Balai  
Disabilitas Sentra Wirajaya



Wawancara dengan Ibu Sunniati  
Pekerja Sosial Ahli Madya Balai  
Disabilitas Sentra Wirajaya

## DOKUMENTASI

## WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Faizah  
Badaruddin Ketua GERKATIN Kota  
Makassar



Wawancara dengan Bapak Ishak  
Ismail Ketua Pusat Disabilitas  
UNHAS



### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/528/SKP/SB/DPMPSTP/10/2023

#### DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/528/SKP/SB/DPMPSTP/10/2023, Tanggal 25 September 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 530/SKP/SB/BKBP/10/2023

#### Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : IRMAWATI  
NIM / Jurusan : E051201004 / Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. Km. 10, Makassar  
Lokasi Penelitian : Terlampir,-  
Waktu Penelitian : 25 September – 10 November  
Tujuan : Skripsi  
Judul Penelitian : " COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR "

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-10-11 14:48:52

Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR  
A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan Kepada Yth

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertanggal,-



## PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211  
Website : [www.dinsos.makassarkota.go.id](http://www.dinsos.makassarkota.go.id) Email : [dinsos@makassarkota.go.id](mailto:dinsos@makassarkota.go.id)



Makassar, 31 Oktober 2023

Nomor : 1421 /Dinsos/070/X/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Surat Penyampaian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hasanuddin Makassar  
di  
Makassar

Berdasarkan surat dari kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Makassar, Nomor : 070/528/SKP/SB/DPMPTSP/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, tentang **Surat Keterangan Penelitian**, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa.

Nama : IRMAWATI  
Nim/Jurusan : E051201004 / Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiwa (S1)  
Alamat : Jln. P. Kemerdekaan KM. 10, Makassar  
Judul Penelitian : "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR"

Telah melakukan **Penelitian** pada Dinas Sosial kota Makassar dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang dilakukan mulai **25 September 2023 s/d 10 November 2023**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi SUL SEL di Makassar
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar di Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp / Fax (0411) 853930 Makassar 90222  
Email : dinasketenagakerjaan makassar@gmail.com Website : disnaker makassar.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 3785 / Disnaker / 070 / XI / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nielma Palamba, SH, M.AP.  
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Dengan Ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini :

Nama : **IRMAWATI**  
NIM / Jurusan : E0151201004/ Ilmu Pemerintahan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Judul : **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA  
MAKASSAR.”**

Telah mengadakan Penelitian pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam rangka kegiatan penelitian penulisan Skripsi dengan Judul tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 November 2023

  
PEMERINTAH KOTA  
DINAS KETENAGAKERJAAN  
**NIELMA PALAMBA, SH, M.AP**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19651210 199112 2 001